

Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Antara Aturan VS Implementasi di Sekolah Dasar Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

Diyar Sugiarti¹

¹Disdikpora Kabupaten Pangandaran, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia; diyarsugiarti@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

BOS Implementation;
School Operational
Assistance Fund (BOS);
Distribution of BOS
Funds;
ARKAS

Article history:

Received 2023-01-20
Revised 2023-02-13
Accepted 2023-05-03

ABSTRACT

There are still problems with the use of school operational funds, both in terms of coverage and use. This study aims to identify several problems, namely: How is the implementation, limitations and efforts to provide BOS financing for educational equity in SD Negeri 1 Padaherang in 2022. In this study the technique used was qualitative data analysis techniques using observation, interview and study techniques data. Based on the findings and discussion results regarding the use of School Operational Assistance funds, SDN 1 Padaherang in the implementation of the allocation of BOS funds has achieved success and is running on target in a directed manner. starting with the planning, implementation, monitoring and evaluation stages of implementation. BOS funds are used to pay for natural benefits, such as finding library reference works, paying for non-teaching activities, tests and exams. Implementation was constrained by delays in BOS funds at each payment stage and a lack of human resources such as the BOS Treasurer to use ARKAS (School Activity Plan and Budget Application). This causes difficulty in generating usage reports. Efforts to overcome obstacles in managing BOS funds are to first seek recovery funds, meanwhile schools provide technical guidance and ARKAS reporting training through the Cluster KKG group to fill gaps in ARKAS understanding that must be overcome.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Diyar Sugiarti
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia; diyarsugiarti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemajuan dalam bidang pembangunan nasional suatu negara salah satunya ditentukan ialah pendidikan (Sagala, 2006). Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggungjawab bersama dalam pembiayaan pendidikan, sumber daya berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lain (Sudarmono, et al, 2021). Telah diatur dalam UUD Negara RI 1945 dengan Pasal 3, ayat (1) yang menyebutkan pendidikan menjadi hak setiap warga negara untuk mengembangkan potensi pada dirinya secara optimal". Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan ini, negara berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan kemampuan dan kepentingannya, tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, ras, suku bangsa, jenis kelamin, atau agama (Putu, 2018). Untuk melaksanakan hal tersebut negara telah berupaya memberlakukan kebijakan peraturan Undang-Undang, pada No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 6 ayat 1, mengamatkan bahwa "usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Diperkuat oleh Pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa "penjaminan wajib belajar minimal yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar haruslah tanpa biaya", selanjutnya dalam ayat 3 menyatakan bahwa "wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat". Oleh karena pelayanan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyeluruh kepada semua siswa baik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan jenjang pendidikan lain yang sejenis.

Pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencarian sumber dana serta penyalurannya untuk keperluan segala penyelenggaraan proses pendidikan (Melati, 2019). Secara garis besar dana pendidikan digunakan untuk mengelola pendidikan secara efektif dan efisien guna menganalisis berbagai sumber pendapatan dan mencapai tujuan dari proses pendidikan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan Bagaimana dana tersebut digunakan (Mulyono, 2010). Dalam penyelenggaraan Pendidikan, ditingkat mikro (lembaga) dan di tingkat makro (negara), manajemen pembiayaan merupakan hal

yang wajib harus terus ditingkatkan kualitasnya (Ekowati, 2019). Pembiayaan pendidikan merupakan elemen yang esensial dan saling berhubungan satu sama lain dalam penyelenggaraan proses kegiatan belajar-mengajar (Ferdin, 2013). Demi mencapai kualitas sekolah yang baik, maka biaya pendidikan harus diatur dengan baik dan benar (Ulpha, 2016).

Pembiayaan pendidikan ialah bagian vital dalam terselenggaranya berbagai program pendidikan, segala sumber dana pembiayaan pendidikan harus di Kelola dan dihitung dengan cermat demi terselenggaranya program pendidikan pada masing-masing lembaga/sekolah (Rojii, 2019). Pengelolaan dana pendidikan berdampak langsung terhadap mutu sekolah, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber belajar. Dari segi administrasi, fasilitator pimpinan sekolah khususnya harus mampu memahami tugas pokok dan proses pengelolaan dana pendidikan, dimulai dari sekolah mempersiapkan RKAS dengan sumber dana BOS. Kepemimpinan yang baik dalam kesiapan RKAS akan berdampak positif pada optimalisasi alokasi dana negara. Selain itu, kita perlu meningkatkan proses perencanaan dan pemantauan penggunaan dana untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Tugas proses pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan guru untuk mencapai tujuan pendidikan. (Ekowati, 2019).

Implementasi penggunaan dana BOS baik penerimaan dan penyalurannya masih mengalami berbagai permasalahan di lapangan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketepatan dan daya guna pemanfaatan yang kemudian menjadi penghambat tercapainya sasaran dana BOS tersebut. Permasalahan yang terjadi yakni terkait dengan esensi rekening sekolah yang tidak berhasil pemutakhiran data, data rekening tidak valid (Kaldera News, 2021). Masalah lainnya adalah penyusunan juknis penyaluran dana BOS yang tidak sesuai aturan, dan banyak sekolah yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. (Republik, 2016)

Maka, untuk tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, pihak sekolah harus berperan besar dalam pemanfaatan dan penggunaan dana BOS (Sucika, dkk, 2018). Berdasarkan adanya permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, peneliti menentukan beberapa poin penting, yaitu:

1. Bagaimana penggunaan dana BOS dalam aspek pemerataan lingkup pendidikan di SD Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ?
2. Apa hambatan yang dihadapi serta upaya pada penyelenggaraan penggunaan Dana BOS di SD Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ?

2. METODE

Pada penelitian mengenai penggunaan Dana BOS Bantuan Operasional Sekolah, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian terhadap kondisi properti dan kondisi yang dialami guna memperoleh jawaban dan klarifikasi berbagai pertanyaan yang terjadi di SD Negeri 1 Padaherang terkait pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran tahun 2022. Teknik pengumpulan data utama penelitian kualitatif berupa observasi partisipan dan indept interview, dan telaah dokumen, yang tujuannya tidak hanya untuk mengumpulkan informasi tetapi juga untuk mengungkapkan pentingnya lingkungan penelitian (Djaelani, Aenu Rofik, 2013). Informan diidentifikasi menggunakan teknik sampling yang ditargetkan. Artinya, informasi diperoleh pada tahap awal dari pihak-pihak yang mampu memberikan keterangan dan informasi relevan serta pendapat atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan uraian diatas, informan penelitian ini adalah kepala sekolah SD Negeri 1 Padaherang, dewan sekolah, guru dan Bendahara BOS. Fokus penelitian ini adalah pada:

1. Penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Padaherang yang meliputi:
 - a. Proses interaksi dan komunikasi berbagai pihak di lingkungan sekolah yakni kepala sekolah, dewan komite sekolah, tim pengelola BOS, Guru sekolah, pihak orang tua siswa dan masyarakat.
 - b. Situasi dan sumber daya yang mendukung seperti fasilitas, anggaran dan sumber daya manusia.

- c. Proses dalam pendekatan implementasi berbagai kebijakan berupa sikap atau disposisi yakni integritas juga komitmen.
 - d. Struktur pada birokrasi sekolah yang mendukung pelaksanaan, pembagian tugas pengelolaan BOS, dan fungsi selama pelaksanaan.
2. Kendala serta upaya dalam pelaksanaan dana BOS.
- a. kendala. berupa: Staf, sarana dan prasarana, komunikasi serta anggaran.
 - b. Upaya berupa: mengikuti bimbingan teknis dan meningkatkan fasilitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

Rencana program pengelolaan dan penggunaan dana BOS dalam pengalokasian dana sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, antara lain Keputusan Mendikbud mengenai petunjuk teknis penggunaan dana BOS, negara setiap tahun mengeluarkan aturan dari BOS pada awal tahun tahun sekolah. SD Negeri 1 Padaherang adalah sekolah yang didanai BOS. Sekolah Dasar Negeri 1 Padaherang terletak di Dusun Sukarenah Desa Padaherang, Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. SD Negeri 1 Padaherang berdiri pada 15 Juli 1951. Secara geografis SD Negeri 1 Padaherang terletak di lokasi yang bisa untuk dijangkau. Berada di tengah kota Padaherang dan tepat di depan Jalan Raya Pangandaran, sekolah SDN 1 Padaherang sangatlah strategis. SD Negeri 1 Padaherang merupakan jenis sekolah standar dengan Nilai Terakreditasi B. Sejak tahun 2015, SD Negeri 1 Padaherang merupakan sekolah ramah anak dan sekolah berkarakter. Sekolah telah menerima Dana BOS SD sejak tahun 2005. Dana BOS pada hakekatnya telah menjadi dana untuk mendukung pengembangan sekolah pada umumnya dan pengelolaan potensi sekolah pada khususnya. Pelaksanaan dana BOS di SD Negeri 1 Padaherang mengikuti petunjuk teknis pengalokasian dana untuk menunjang operasional sekolah yaitu pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pengaturan Kebijakan Dana BOS 2022 tertuang

dalam Permendikbudristek 2022 nomor 2, yang menyangkut petunjuk teknis pengelola dana penyelenggaraan pendidikan usia dini, dukungan operasional sekolah dan dukungan operasional penyelenggara Pendidikan Kesetaraan. Adapun mengenai pengurusan dokumen, pengurusan dan tanggung jawab keuangan juga diatur dalam Permendagri. Pertama adalah Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pendahuluan APBD.

Peneliti mengidentifikasi pelaksanaan dana BOS dan menganalisis berdasarkan Teori dan konsep dari Edward tiga pada Widodo (2011):

1. Komunikasi

Komponen terpenting dalam mengevaluasi apakah kebijakan tersebut berjalan baik atau tidak adalah dengan komunikasi. Sebab komunikasi mempengaruhi terhadap penerimaan pelaksana. Pemberitahuan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pendistribusian (delivery), kejelasan pelaksanaan agar pelaksanaan tidak membingungkan dan pelaksanaan pedoman konsisten.

Komunikasi selama menggunakan dana BOS SD Negeri 1 Padaherang baik tertulis maupun tidak tertulis dilaksanakan secara terukur. Hal ini dianggap konsisten karena meskipun ada perubahan administrasi pada teknik pelaporan, hal ini merupakan langkah menuju penyelesaian laporan BOS untuk alokasi dana BOS. Implementasi kebijakan yang berhasil menuntut pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Kelompok sasaran harus diberi tahu tentang tujuan dan maksud kebijakan untuk mengurangi bias dalam implementasi. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak dipahami dengan jelas atau bahkan tidak dipahami oleh kelompok sasaran, maka dapat diperkirakan terjadi kesalahpahaman dari kelompok sasaran.

Sebagaimana dikemukakan oleh Edward 3 (Widodo, 2011), komunikasi dalam melibatkan beberapa aspek utama, yaitu transformasi informasi (transfer), kejelasan dalam informasi (clarity), serta konsistensi dalam informasi (consistency). Luasnya perubahan membutuhkan transmisi informasi tidak hanya untuk implementasi kebijakan namun juga untuk kelompok tujuan dan keluarga peserta didik. Aspek

kejelasan memerlukan informasi yang baik dan mudah dipahami agar tidak terjadi salah tafsir oleh pelaksana aturan, kelompok tujuan dan pihak yang terlibat dalam aplikasi kebijakan. Di sisi lain, aspek koherensi mensyaratkan agar informasi yang ditujukan harus selaras, sehingga tidak memunculkan kerancuan antara penyelenggara kebijakan, kelompok tujuan, dan pihak terkait.

2. Sumber Daya

Variabel lain yang memberikan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan dana BOS yaitu sumber daya. Sumber daya terbagi menjadi beberapa aspek diantaranya staf adalah sumber daya utama. Pegawai yang bertindak sebagai penentu dalam pelaksanaan aturan penggunaan dana BOS ialah orang yang ahli dan mampu mengelola yaitu Kepala Sekolah, Dewan Sekolah Komite, Guru, Staf, dan Tim Administrasi BOS. Seluruhnya secara umum SD Negeri 1 Padaherang sudah diamanatkan oleh pemerintah daerah, termasuk yang terkait dengan pelaksanaan penggunaan dana BOS yakni dimensi perencanaan dalam penganggaran, dimensi penyelenggaraan, dan dimensi pertanggung jawaban laporan keuangan dana BOS, hal tersebut dilaksanakan seperti petunjuk teknis anggaran BOS.

Dengan tidak adanya temuan penyalahgunaan atau pelanggaran dana BOS oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak pernah ada Surat Peringatan (surat teguran) membuktikan bahwa SD Negeri 1 Padaherang patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan dibuktikan guru dan staf konsisten dalam implementasi dana BOS. Elemen sumber daya yang ketiga adalah otoritas. Surat kuasa harus resmi agar amanat dapat dilaksanakan. Di SD Negeri 1 Padaherang dewan sekolah harus bekerjasama dengan Pengontrol Dana BOS SD Korwil Disdikpora Kec. Padaherang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran sebagai contoh perekrutan operator BOS untuk menangani bendahara bekerja lebih cepat dalam menyusun laporan keuangan.

Dengan demikian kepala SD Negeri 1 Padaherang tidak menyalahgunakan wewenangnya, ia tetap dapat mempergunakan kewenangannya untuk meningkatkan keterampilan guru dan staf, bukan untuk kepentingan sebagian orang atau kelompok, melainkan untuk pembangunan manusia. Sumber Daya (Sumber Daya Manusia) di

SD Negeri 1 Padaherang. Kemudian fasilitas yang berupa sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dana BOS. Sebagaimana dicatat oleh Edward 3 (Widodo 2011), sumber daya memainkan peran vital dalam implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan Edward III menegaskan bahwa:

“Sejelas dan sekonsisten apapun peraturan dan aturan itu, dan betapa pun tepatnya pelaksanaan peraturan atau aturan itu, jika para penegak kebijakan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan itu tidak memiliki sarana untuk mengimplementasikan kebijakan itu secara efektif, implementasinya Kebijakan ini tidak akan dilaksanakan.” Sumber daya yang dipaparkan tersebut adalah semua sumber yang bisa dipakai untuk mendorong ketercapaian implementasi kebijakan BOS. Sumber daya tersebut berupa SDM, dana, sarana, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi/sikap

Disposisi merupakan aspek ketiga yang dapat mempengaruhi dalam implementasi, yaitu sikap implementasi, juga dikenal sebagai disposisi. Karakter merupakan faktor utama pada pendekatan implementasi kebijakan umum. Pemimpin harus tahu apa yang perlu dilakukan serta memiliki kemampuan untuk melakukannya. Berdasarkan yang kami dapatkan dari SD Negeri 1 Padaherang, ada dua hal yang memiliki tujuan yaitu:

Pertama, kurangi birokrasi kemudian kedua, ciptakan insentif. namun menurut Edward 3 (Widodo 2011), “kecenderungan atau kecenderungan merupakan salah satu faktor yang berimplikasi penting bagi implementasi politik yang efektif”. Jika pelaksana memiliki prasangka atau sikap positif, atau jika ada dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan, maka kemungkinan besar pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan keputusan semula. Sebaliknya, jika pihak eksekutif bersikap negatif atau menolak melaksanakan kebijakan karena adanya benturan kepentingan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi hambatan yang serius.

4. Struktur Birokrasi

Elemen birokrasi politik yang beragam misalnya itu membutuhkan kerjasama yang baik antar pemangku kebijakan & waktu, struktur birokrasi kurang mendukung kebijakan yang ada, sehingga implementasi kebijakan akan sulit. Sebagai pelaksana

kebijakan birokrasi, wajib bisa mendukung kebijakan yg diputuskan secara politis menggunakan koordinasi yg baik. Struktur birokrasi aplikasi alokasi asal daya BOS pada Sekolah Dasar Negeri 1 Padaherang terdiri berdasarkan 3 penanggung jawab yaitu ketua sekolah, komite sekolah, tim pengelola BOS & pengawas sekolah yang sinkron menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Struktur organisasi yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan kebijakan mempunyai efek yang meningkat terhadap pelaksanaan kebijakan. Beberapa aspek struktural yang vital berdasarkan suatu organisasi merupakan adanya baku operasional mekanisme (SOP). SOP memungkinkan penegak buat memanfaatkan saat yang tersedia. SOP sebagai panduan bagi setiap pelaksana pada perusahaan. Struktur organisasi mempunyai efek yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan. Dimensi struktur organisasi ini meliputi 2 hal yaitu prosedur & struktur birokrasi tersebut. Aspek yang pertama merupakan prosedur, umumnya mengikuti baku operasional mekanisme (SOP) waktu menerapkan suatu kebijakan. SOP adalah petunjuk bagi setiap pelaksana waktu bertindak supaya aplikasi kebijakan nir menyimpang berdasarkan maksud & tujuan kebijakan. Aspek lain merupakan struktur birokrasi, struktur birokrasi yg terlalu bertele-tele & terfragmentasi justru akan melemahkan kontrol & menyebabkan mekanisme birokrasi yang kompleks & rumit, yang dalam gilirannya menciptakan operasi organisasi kaku (Widodo, 2011).

3.2. Kendala dan Upaya Dalam Implementasi Dana BOS di SD Negeri 1 Padaherang, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran

Secara keseluruhan implementasi kebijakan pendidikan sudah berjalan cukup baik, namun implementasinya masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan upaya. Tentang berbagai kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan kebijakan program Dana BOS. Kendalanya adalah penerimaan anggaran BOS yang sering terlambat, dan meskipun adanya keterbatasan internal dalam melaksanakan peraturan program Dana BOS di SD Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, infrastruktur pendukung pengelolaan dana BOS didukung Keuangan, staf yang tidak memadai. Langkah-langkah karena rumitnya penyusunan

laporan diatur dalam pelaporan dana BOS yang diatur dalam Pasal 79 Keputusan Dewan Negara Tahun 2008 Nomor 48 tentang Pembiayaan Pendidikan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi akuntansi (LPJ) aplikasi ARKAS diimplementasikan dalam bentuk BKU (buku kas umum), BKT (buku kas), buku besar bank dan buku bantuan pajak, yang dilaksanakan setiap akhir bulan. Waktu tanggung jawab tergantung pada peraturan saat ini yang dikenakan pada sekolah swasta oleh negara atau yayasan. Bentuk tanggung jawab dalam implementasi program BOS adalah sekolah, pihak dinas pendidikan kabupaten/kota, pihak dinas pendidikan kabupaten dan dinas pembangunan harus membuat laporan hasil pelaksanaan program kepada pihak terkait. Secara umum, laporan yang harus dibuat oleh sekolah penerima dana SD-BOS adalah sebagai berikut: Laporan secara bertahap, i. H. Tahap I/Januari-April), Tahap II/Mei-Agustus dan Tahap III/September-Desember).

Berbagai permasalahan yang muncul di SD Negeri 1 Padaherang menjadi kendala dalam pengenalan dana BOS, maka harus segera dicarikan jalan keluar agar penerapannya berjalan baik sesuai dengan yang diinginkan yaitu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu wajib belajar yang berkualitas. SD Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran upaya mengatasi kendala yang ada cukup maksimal dalam mengelola dana BOS yaitu mencari dana penyelamatan terlebih dahulu menggunakan dana penyelamatan dari uang pribadi dan upaya kepala sekolah dan pihak sekolah bendahara digunakan. Sekolah menyiapkan laporan untuk menjelaskan keterlambatan dengan menangani Bendahara dana BOS dalam menyiapkan laporan keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program negara yang pada intinya membiayai biaya operasional material satuan sekolah dasar sebagai pengemban program wajib belajar di sekolah dasar.

Berdasarkan edaran Mendikbud RI, No 80 Tahun 2015, juknis Tanggung Jawab Keuangan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Dasar dan Menengah. Sekolah Menengah Pertama (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menangani mengisi perlengkapan sekolah tersebut. BOS SD dan SMP dipakai untuk membantu sekolah

menutupi biaya perlengkapan sekolah, termasuk pembelian buku pelajaran pada tahun 2013.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan dana untuk menunjang operasionalnya sekolah di SD Negeri 1 Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan dana BOS tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Baik itu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun evaluasi pelaksanaan hingga pengalokasian dana BOS, seluruhnya berjalan dengan lancar.

Hambatan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu terlambatnya pencairan dana BOS dan kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur, menyebabkan kesulitan dalam penyusunan pelaporan penggunaan BOS karena membutuhkan waktu dan informasi. Tim pengelola BOS dalam manajemen keuangan. Cara mengantisipasi kendala penggunaan dana BOS adalah dengan mengajukan hibah terlebih dahulu dengan mengajukan pinjaman dan pihak sekolah berusaha mengatasi ketidakpahaman antara guru, staf dan dewan sekolah karena kurangnya bimbingan teknis untuk semua. mengalahkan guru, staf dan komite, sekolah didukung oleh klaster memberikan bimbingan teknis dan pelatihan cara penggunaan dana BOS dan mengatasi keterlambatan penagihan, khususnya membantu Bendahara BOS dalam menyusun laporan keuangan dan secara rutin mengikuti juknis online dan juknis langsung. instruksi pelaporan ARKAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani & Mokhtar M. (2019). Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar Di Kota Makassar (Vol. 10, No 2).
<https://doi.org/10.21009/10.21009/JPD.081>
- Djaelani & Rofik A. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20(1), 82-92.
- Ekowati, E.T., Sunandar, & Nyoman, N. A. (2019). Manajemen Pembiayaan

- Pendidikan Di Sekolah Dasar Islam Ar Rahmah Kecamatan Suruh, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), <https://doi.org/10.26877/jmp.v8i1.5368>
- Fattah, N. (2002). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ferdi, W.P., (2011). *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>
- Kaldera News. 2021. Ini Akibat Administrasi Penyaluran Dana BOS yang Tak Kunjung Diselesaikan. (<https://www.kalderanews.com/2021/11/ini-akibat-administrasi-penyialuran-dana-bos-yang-tak-kunjung-diselesaikan>)
- “Kebijakan Dana BOS tahun 2022” Direktorat Sekolah Dasar . 09 Februari 2022. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/kebijakan-dana-bos-sekolah-dasar-tahun-2022>
- Kurniadi, D., A., (2012). Efektivitas Dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol 14 No. 01. <https://doi.org/10.17509/jap.v14i1.6720>
- Melati. (2019). Pembiayaan di Sekolah Dasar Negeri 4 Semadam Kab. Aceh Tenggara. *EducanduM: Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 12 No 1. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/em/article/view/22909>
- Muliatuise, Husnatarina F., Priyati, R., Y., (2022). Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Dana BOS pada SMKN-1 Pangkalan Bun. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 6 No 1 4288-4295 <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3531>
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. (Edisi Revisi) Jakarta : Ar-Ruzz Media.
- Republika. 2016. Tindak Lanjut Temuan BPK Soal Dana BOS. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/23/o1dyr4330-kemendikbud-akan-tindaklanjuti-temuan-bpk-soal-dana-bos>)
- Rojii, Muhammad., (2019). *Problematika Pembiayaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Di Indonesia*. Universitas Muhamadiyah Sidoarjo. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6498>

- Sailan, Manan., (2011). Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. Vol 2, 1. 10-15. <https://www.neliti.com/publications/96967/pembiayaan-pendidikan-di-sekolah-dasar-kota-bau-bau-provinsi-sulawesi-tenggara>
- Sucika, Putu., Suprpta, I, N., (2018). Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Locus majalah Ilmiah FISIP*. Vol 9. No 1.
<https://doi.org/10.37637/locus.v9i1.80>
- Sudarmono, Hasibuan L., Anwar, K., (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol 2(1).
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>
- Tinggogoy, Deiby,. C., (2019). Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 7 (1).
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i01.37>
- Ulpha., Kurniadi., D., (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Vol.XXIII No.2. <https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<https://www.dpr.go.id/dokumen/pansus-undang-undang-dasar-tahun-1945-1421724948.pdf>. Diakses Desember, 2, 2022
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia
- Widiastuti, G., Zaenal, H., Dwimawanti, I., H., (2012). Analisis Kualitas Pelayanan Penyaluran Dana Bos Tahun 2011 Di Dinas Pendidikan Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol 1 No 2
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i2.1307>